

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang

Difani Aulia Zulka¹, Laeli Nur Khanifah², Muhammad Rayya Abidzar³, Anggita Naila Dwi Hartika⁴, Gina Apriyanti⁵, Indah Ayuningtyas⁶

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Corresponding Author's: divaniauliazulka22@gmail.com, khanifah92@untirta.ac.id,
rayyaabizar@gmail.com, anggitanaila70@gmail.com, ginaapry22@gmail.com,
indahayuningtyas478@gmail.com

e-ISSN: 0000-0000

Article History:

Received: 06-02-2025

Accepted: 28-02-2025

© 2025, The Author(s)

Abstrak: Permasalahan persampahan masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Serang seiring meningkatnya volume sampah, luasnya wilayah pelayanan, keterbatasan armada pengangkut, serta belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik daerah. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan anggaran persampahan yang efektif guna mendukung pelayanan yang optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis besaran dan realisasi anggaran persampahan serta efektivitas pengelolaan anggaran persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan enam informan yang terdiri atas Kasubbag Keuangan Perencanaan, Kasubbag Keuangan/Pencairan, staf Persampahan dan Limbah B3, petugas pengangkut sampah, serta dua orang masyarakat penerima layanan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, sedangkan analisis efektivitas mengacu pada teori Efektivitas Organisasi Richard M. Steers yang meliputi indikator goal attainment, integration, dan adaptation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran persampahan lebih besar dibandingkan anggaran yang disetujui sehingga terjadi kesenjangan antara kebutuhan riil dan kapasitas fiskal daerah. Pada aspek goal attainment, pencapaian tujuan belum optimal akibat keterbatasan anggaran, armada, dan ketergantungan pada TPA Cilowong. Pada aspek integration, koordinasi internal berjalan cukup baik, namun koordinasi eksternal masih menghadapi kendala. Pada aspek adaptation, organisasi mampu melakukan penyesuaian melalui revisi anggaran, pengembangan TPS 3R dan bank sampah, serta penyesuaian operasional, meskipun masih bersifat responsif. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran persampahan belum sepenuhnya efektif sehingga diperlukan peningkatan alokasi anggaran, penguatan koordinasi, dan pengembangan infrastruktur persampahan.

Kata Kunci: efektivitas pengelolaan anggaran, persampahan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Serang, efektivitas organisasi.



PENDAHULUAN

Permasalahan sampah masih menjadi tantangan lingkungan yang serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Serang. Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan perkembangan kawasan permukiman menyebabkan volume sampah terus meningkat dari tahun ke tahun. Apabila tidak dikelola secara optimal, timbulan sampah dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah telah mendorong penerapan konsep reduce, reuse, dan recycle (3R) sebagai strategi pengurangan sampah dari sumbernya, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan daerah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2023; Ni'mattullah et al., 2022).

Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan persampahan. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 volume sampah yang berhasil diangkut mencapai 100.283,30 m³ atau sekitar 33.427,77 ton. Besarnya volume sampah tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Namun demikian, pengelolaan persampahan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan armada pengangkut, fasilitas pengolahan sampah yang belum memadai, serta luas wilayah pelayanan yang cukup besar sehingga pelayanan persampahan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal (DLH Kabupaten Serang, 2024).

Pengelolaan persampahan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Seluruh kegiatan persampahan, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah, memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efektivitas pengelolaan anggaran menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program persampahan, karena keterbatasan anggaran dapat menghambat penyediaan sarana, operasional pelayanan, serta pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah (Maulana et al., 2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menghadapi kendala akibat keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pelaksanaan program persampahan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan kebersihan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi peningkatan timbulan sampah setiap tahun (Khoirunnisa et al., 2025). Meskipun demikian, kajian mengenai efektivitas pengelolaan anggaran persampahan di Kabupaten Serang masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis besaran dan realisasi anggaran persampahan serta efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sebagai upaya mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam efektivitas pengelolaan anggaran persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial melalui penggalan informasi secara langsung dari para informan mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan anggaran persampahan dalam konteks organisasi yang nyata (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh makna di balik berbagai kebijakan dan praktik pengelolaan anggaran yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.

Desain penelitian menggunakan studi kasus (case study), yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara jelas (Yin, 2023). Pemilihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki kewenangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan daerah, sekaligus menghadapi berbagai tantangan terkait keterbatasan anggaran, peningkatan volume sampah, kebutuhan sarana dan prasarana, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Fokus penelitian mengacu pada teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Steers yang meliputi tiga dimensi utama, yaitu goal attainment (pencapaian tujuan), integration (integrasi), dan adaptation (adaptasi). Dimensi goal attainment digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan anggaran mampu mendukung pencapaian target pelayanan persampahan sesuai indikator kinerja organisasi. Dimensi integration digunakan untuk mengkaji tingkat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antarbidang maupun dengan para pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan anggaran. Sementara itu, dimensi adaptation digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam menyesuaikan pengelolaan anggaran terhadap perubahan kebutuhan pelayanan, kondisi lingkungan, regulasi, serta tantangan operasional yang dihadapi (Steers, 2021).

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan realisasi anggaran, dokumen perencanaan daerah, Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran persampahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam sekaligus memberikan keleluasaan kepada informan dalam menjelaskan pengalaman dan pandangannya. Kedua, observasi, yang dilakukan secara langsung terhadap aktivitas operasional pelayanan persampahan, penggunaan sarana dan prasarana, serta proses pelaksanaan program yang didanai melalui anggaran persampahan. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan berbagai dokumen administrasi, laporan keuangan, dokumen kebijakan, foto kegiatan, dan arsip lainnya yang relevan sebagai bahan pendukung analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang berlangsung secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh; penyajian data (data display) dalam bentuk narasi, matriks, dan tabel sehingga memudahkan peneliti memahami pola hubungan antar data; serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification) yang dilakukan secara berulang melalui proses interpretasi dan pengecekan kembali terhadap seluruh data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Provinsi Banten selama periode April hingga Juni 2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan, mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan operasional, pengangkutan, pengolahan hingga pengawasan pengelolaan sampah. Selain itu, Kabupaten Serang menghadapi

berbagai tantangan dalam pengelolaan persampahan, seperti peningkatan timbulan sampah, keterbatasan anggaran, kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan anggaran persampahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang merupakan perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan persampahan dan limbah B3 (Maulana et al., 2024). Dalam penelitian ini, bagian yang relevan meliputi Bidang Persampahan, Subbagian Keuangan Perencanaan, dan Subbagian Keuangan/Pencairan.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Serang menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu tingginya volume sampah, keterbatasan armada, dan belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik daerah (Khoirunnisa et al., 2025; KLHK, 2023). Volume timbulan sampah Kabupaten Serang tahun 2023 tercatat sebesar 100.283,30 m³ (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, 2024). Sementara itu, armada pengangkut sampah yang tersedia hanya sekitar 22 unit, jauh dari kebutuhan ideal yang menurut informan dapat mencapai lebih dari 100 unit (Kasubag Keuangan Perencanaan DLH Kabupaten Serang, komunikasi pribadi, 2026).

Selain itu, Kabupaten Serang masih bergantung pada TPA Cilowong di Kota Serang. Ketergantungan ini menimbulkan kendala karena terdapat batasan kuota pembuangan sampah per hari. Akibatnya, tidak semua sampah dapat langsung dibuang ke TPA apabila volume melebihi kapasitas yang diperbolehkan (Ni'mattullah et al., 2022; Maulana et al., 2024).

Profil Informan

Penelitian ini melibatkan lima kategori informan yang terdiri atas enam narasumber. Informan dipilih secara purposif karena memiliki peran langsung dalam perencanaan anggaran, pencairan anggaran, pelaksanaan program, operasional pengangkutan, serta penerimaan layanan persampahan (Sugiyono, 2022; Yusuf et al., 2021).

No.	Informan	Posisi	Peran dalam Penelitian
1	Kasubbag Keuangan Perencanaan	DLH Kabupaten Serang	Menjelaskan proses perencanaan dan penyusunan anggaran persampahan
2	Mawadah	Kasubbag Keuangan/Pencairan	Menjelaskan mekanisme pencairan dan penatausahaan anggaran
3	Dani	Staf Persampahan dan Limbah B3	Menjelaskan pelaksanaan program persampahan
4	Petugas Pengangkut Sampah	Petugas lapangan DLH	Menjelaskan operasional pengangkutan dan kondisi armada
5	Nadi dan Lutfi	Masyarakat	Menjelaskan dampak layanan persampahan bagi warga

Sumber: (Data primer, wawancara lapangan, April-Mei, 2026)

Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Persampahan

Hasil wawancara dengan Kasubbag Keuangan Perencanaan menunjukkan bahwa penyusunan anggaran persampahan mengikuti dokumen perencanaan daerah (Maulana et al., 2024). Informan menjelaskan bahwa penyusunan anggaran dimulai dari RPJMD, kemudian diturunkan ke Renstra, RKPD, dan Renja. Menurut informan, "runtutannya itu dari dokumen perencanaan daerah. Awalnya dari RPJMD, lalu diturunkan ke Renstra, kemudian masuk ke RKPD dan Renja" (Kasubbag Keuangan Perencanaan DLH Kabupaten Serang, 2026).

Perencanaan anggaran juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang kecamatan dan forum Renja (Rahmawati et al., 2022). Namun, kebutuhan yang dihitung oleh dinas belum selalu sesuai dengan anggaran yang disetujui. Informan menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran persampahan dapat mencapai Rp48 miliar,

tetapi anggaran yang diberikan hanya sekitar Rp20 miliar. Akibatnya, program yang telah direncanakan harus dikurangi.

Keterbatasan anggaran juga terlihat pada biaya pembuangan sampah ke TPA Cilowong. Kebutuhan riil dapat mencapai Rp15 miliar hingga Rp19 miliar per tahun, sedangkan anggaran murni terkadang hanya sekitar Rp11 miliar hingga Rp12 miliar. Jika tidak ada tambahan melalui anggaran perubahan, kekurangan tersebut dapat menjadi utang pada tahun berikutnya (Khoirunnisa et al., 2025).

Mekanisme Pencairan Anggaran Persampahan

Informan kedua, Mawadah, menjelaskan bahwa Subbagian Keuangan tidak menentukan alokasi anggaran sejak awal. Perannya lebih pada verifikasi dan pencairan setelah bidang teknis atau PPTK mengajukan kebutuhan. Pengajuan tersebut dapat berupa pembayaran petugas kebersihan, pembelian alat kerja, pemeliharaan kendaraan, dan kebutuhan operasional lainnya (Prasetyo & Nugroho, 2023).

Mawadah menyampaikan bahwa “mekanismenya dimulai dari bidang teknis atau PPTK” yang kemudian diverifikasi oleh bagian keuangan berdasarkan kelengkapan dokumen dan kesesuaian pagu anggaran (Mawadah, 2026). Kendala yang sering muncul adalah pengajuan yang melebihi pagu pada triwulan berjalan. Jika hal ini terjadi, bidang terkait harus melakukan revisi atau pergeseran anggaran terlebih dahulu.

Keterlambatan pencairan berdampak langsung pada pelayanan persampahan. Mawadah menjelaskan bahwa apabila anggaran tidak tersedia atau pencairan terhambat, kegiatan seperti pengangkutan sampah, pemeliharaan armada, dan pembayaran petugas dapat ikut terganggu (Mawadah, 2026). Meski demikian, kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tetap diupayakan berjalan (Maulana et al., 2024).

Pelaksanaan Program Persampahan di Lapangan

Informan ketiga, Dani, menjelaskan bahwa program persampahan DLH Kabupaten Serang meliputi TPS 3R, bank sampah, TPST, sosialisasi pemilahan sampah, dan pengangkutan residu ke TPA Cilowong. Beberapa TPS 3R berada di Ciruas, Anyer, Bojonegara, dan Kibin, sedangkan TPST terdapat di wilayah Kibin (KLHK, 2023).

Menurut Dani, fokus utama pengelolaan sampah adalah mendorong pemilahan dari rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa “kalau semua sampah tercampur, volume yang harus diangkut menjadi lebih besar” sehingga masyarakat perlu diajak memilah sampah sejak dari sumbernya (Dani, 2026). Pendekatan pengurangan sampah dari sumber merupakan salah satu prinsip utama pengelolaan sampah berkelanjutan (Ni'mattullah et al., 2022).

Dani juga menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan lapangan. Keterbatasan anggaran berdampak pada kegiatan sosialisasi, fasilitasi bank sampah, bantuan sarana, dan pembinaan masyarakat. Namun, pengangkutan sampah tetap menjadi prioritas karena jika tidak dilakukan, sampah akan menumpuk dan menimbulkan keluhan masyarakat (Khoirunnisa et al., 2025).

Kendala lain adalah belum semua desa mengalokasikan dana desa untuk kegiatan persampahan. Padahal, dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan sarana pengelolaan sampah, penyediaan tempat sampah, atau fasilitas pengolahan sederhana di tingkat desa (Hidayat & Pramono, 2022).

Operasional Harian Pengangkutan Sampah

Informan keempat, petugas pengangkut sampah, menjelaskan bahwa kegiatan pengangkutan biasanya dimulai pukul 07.00 dari kantor menuju TPH sesuai rute. Jika kondisi lancar, petugas kembali sekitar pukul 12.00 siang.

Jadwal pengangkutan sudah berjalan sesuai arahan. Namun, kendala utama berada pada kondisi armada. Petugas menyampaikan bahwa “ada kendaraan yang sudah mulai rusak atau sering bermasalah karena memang dipakai terus untuk operasional” (Petugas Pengangkut Sampah DLH Kabupaten Serang, 2026). Jika kendaraan rusak, pengangkutan dapat terlambat atau harus menyesuaikan dengan armada lain yang masih bisa digunakan. Permasalahan keterbatasan armada merupakan salah satu hambatan umum dalam pelayanan persampahan daerah (Maulana et al., 2024).

Dari sisi koordinasi, petugas menyatakan bahwa komunikasi dengan koordinator lapangan dan antarpetugas berjalan baik. Koordinasi dilakukan terkait rute, jadwal, perubahan kondisi lapangan, dan penanganan penumpukan sampah (Rahmawati et al., 2022).

Persepsi Masyarakat terhadap Layanan Persampahan

Informan masyarakat, yaitu Nadi dan Lutfi, menyampaikan bahwa penumpukan sampah masih mengganggu kenyamanan warga. Nadi berharap sampah dapat segera diangkut agar tidak terlalu lama menumpuk. Ia menyampaikan, “harapannya sampah bisa langsung diambil atau diangkut” supaya tidak menimbulkan bau dan mengganggu masyarakat (Nadi, 2026).

Lutfi juga menyampaikan keluhan serupa. Menurutnya, sampah yang menumpuk menimbulkan bau tidak sedap, nyamuk, dan lingkungan yang kurang sehat. Ia menyatakan bahwa “kalau sampah menumpuk, baunya tidak sedap dan bisa menimbulkan banyak nyamuk” (Lutfi, 2026). Kedua informan berharap pengangkutan sampah dilakukan lebih rutin agar lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keterlambatan pengangkutan sampah berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat (Khoirunnisa et al., 2025).

Pola Umum Temuan

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa pola utama. Pertama, terdapat kesenjangan antara kebutuhan anggaran persampahan dan anggaran yang tersedia. Kesenjangan ini terlihat dari keterbatasan armada, biaya pembuangan sampah yang tinggi, serta kebutuhan operasional yang belum sepenuhnya terpenuhi (Maulana et al., 2024).

Kedua, layanan pengangkutan sampah tetap menjadi prioritas meskipun anggaran terbatas. DLH tetap berupaya menjalankan layanan dasar karena persampahan berkaitan langsung dengan masyarakat (KLHK, 2023). Ketiga, kondisi armada menjadi kendala penting dalam operasional harian. Armada yang sering rusak dapat menghambat pengangkutan dan memperlambat pelayanan (Khoirunnisa et al., 2025).

Keempat, masyarakat merasakan dampak langsung dari penumpukan sampah, terutama bau tidak sedap, nyamuk, dan gangguan kenyamanan lingkungan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran persampahan di DLH Kabupaten Serang masih menghadapi kendala pada aspek keterbatasan anggaran, sarana pengangkutan, ketergantungan pada TPA Cilowong, dan dukungan pengelolaan sampah di tingkat desa. Temuan ini menjadi dasar untuk dianalisis lebih lanjut pada bagian pembahasan (Ni'mattullah et al., 2022; Maulana et al., 2024).

Pembahasan

Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)

Indikator goal attainment atau pencapaian tujuan digunakan untuk menilai sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang mampu merealisasikan sasaran

pengelolaan persampahan melalui dukungan anggaran yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan anggaran persampahan telah mengikuti tahapan perencanaan yang sistematis melalui RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja, serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang dan forum perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki arah kebijakan dan target yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan. Menurut Steers (1977), efektivitas organisasi dapat dilihat dari kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks sektor publik, anggaran berfungsi sebagai instrumen utama yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan program, dan pencapaian pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan riil anggaran persampahan dan anggaran yang disetujui pemerintah daerah. Kebutuhan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah hanya dapat dipenuhi sebagian sehingga beberapa program harus dikurangi atau disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan pembiayaan berdampak langsung pada kemampuan organisasi dalam melaksanakan program persampahan secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kecukupan pembiayaan, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan layanan yang dimiliki pemerintah daerah (World Bank, 2021; Lestari & Ningsih, 2025).

Selain keterbatasan anggaran, pencapaian tujuan juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan persampahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah armada pengangkut sampah yang tersedia masih jauh di bawah kebutuhan ideal sehingga kemampuan pelayanan belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Di sisi lain, Kabupaten Serang juga belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri dan masih bergantung pada TPA Cilowong di Kota Serang yang memiliki pembatasan kuota pembuangan harian. Keterbatasan tersebut menyebabkan proses pengangkutan dan pembuangan sampah belum berjalan secara maksimal serta berpotensi menimbulkan penumpukan sampah di beberapa lokasi. Dari aspek administrasi, proses pencairan anggaran juga memengaruhi pelaksanaan program karena setiap pengajuan harus melalui verifikasi dan penyesuaian terhadap pagu anggaran yang tersedia. Meskipun demikian, DLH Kabupaten Serang tetap memprioritaskan kegiatan pengangkutan sampah sebagai layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi untuk mempertahankan pelayanan publik meskipun menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Akan tetapi, masih adanya keluhan masyarakat terkait penumpukan sampah, bau tidak sedap, dan gangguan lingkungan menunjukkan bahwa tujuan pelayanan persampahan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, berdasarkan indikator goal attainment yang dikemukakan oleh Steers (1977), efektivitas pengelolaan anggaran persampahan pada DLH Kabupaten Serang dapat dikategorikan cukup efektif namun belum optimal, karena masih terdapat kesenjangan antara target yang direncanakan dengan kapasitas anggaran, sarana, dan infrastruktur yang tersedia (Kaza et al., 2018; Batista et al., 2021; Breukelman et al., 2022; UNEP & ISWA, 2024).

Integration (Integrasi)

Indikator integration (integrasi) digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antarunit maupun dengan pihak eksternal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, integrasi dalam pengelolaan anggaran persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang terlihat dari adanya koordinasi yang berjalan antara bagian

perencanaan, PPTK, dan bagian keuangan dalam proses penyusunan, pengelolaan, hingga pencairan anggaran. Masing-masing unit memiliki tugas yang berbeda tetapi saling berkaitan sehingga keberhasilan pelaksanaan program persampahan sangat bergantung pada kelancaran komunikasi dan koordinasi antarpihak tersebut. Bagian perencanaan bertanggung jawab menyusun dan mengalokasikan anggaran berdasarkan dokumen perencanaan daerah, bidang teknis menyusun kebutuhan operasional di lapangan, sedangkan bagian keuangan melakukan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa secara internal telah terdapat mekanisme kerja yang cukup terintegrasi sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan sesuai prosedur. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Steers (1977) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang jelas, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menyelaraskan fungsi dan peran seluruh unit kerja. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Agyaputeri et al. (2025) yang menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program di lapangan.

Selain integrasi internal, hasil penelitian menunjukkan adanya upaya membangun integrasi eksternal melalui kerja sama dengan kecamatan, desa, RT/RW, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung program persampahan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta pelimpahan sebagian pengelolaan persampahan kepada kecamatan sebagai bentuk desentralisasi pelayanan. Namun demikian, efektivitas integrasi eksternal masih menghadapi beberapa kendala, terutama belum optimalnya dukungan pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa untuk kegiatan persampahan serta ketergantungan Kabupaten Serang terhadap TPA Cilowong yang memerlukan koordinasi lintas daerah. Selain itu, masih terdapat kondisi ketika kebutuhan operasional di lapangan melebihi pagu anggaran yang tersedia sehingga diperlukan revisi atau pergeseran anggaran yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Meskipun berbagai hambatan tersebut masih ditemukan, secara umum koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan telah berjalan cukup baik sehingga layanan persampahan tetap dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, berdasarkan indikator integration yang dikemukakan oleh Steers (1977), pengelolaan anggaran persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dapat dikategorikan cukup efektif, meskipun masih memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan partisipasi pemerintah desa, serta optimalisasi kerja sama antardaerah untuk mendukung pengelolaan persampahan yang lebih terpadu dan berkelanjutan (Rizky et al., 2024; Hasan et al., 2025).

Adaptation (Adaptasi)

Indikator adaptation (adaptasi) digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, tuntutan masyarakat, serta berbagai keterbatasan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang menunjukkan kemampuan adaptasi melalui berbagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan anggaran, peningkatan volume sampah, dan kebutuhan operasional yang terus berkembang. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan adalah penggunaan mekanisme anggaran perubahan ketika kebutuhan riil persampahan melebihi alokasi anggaran murni yang telah ditetapkan pada awal tahun. Selain itu, ketika pengajuan kebutuhan operasional melebihi pagu yang tersedia, dilakukan revisi maupun pergeseran anggaran agar pelayanan tetap dapat berjalan. Upaya adaptasi juga terlihat melalui pengembangan TPS 3R, bank sampah, TPST, serta sosialisasi pemilahan sampah dari sumber sebagai strategi

untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke tempat pembuangan akhir. Menurut Steers (1977), organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan agar tetap dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan. Temuan ini juga sejalan dengan Bryson et al. (2014) yang menyatakan bahwa organisasi publik yang adaptif ditandai oleh kemampuan melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, dan sumber daya dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan.

Kemampuan adaptasi juga terlihat pada aspek operasional pelayanan persampahan. Ketika armada pengangkut mengalami kerusakan, petugas melakukan penyesuaian dengan menggunakan kendaraan lain yang masih berfungsi atau mengatur kembali jadwal pelayanan agar pengangkutan sampah tetap berjalan. Di sisi lain, DLH Kabupaten Serang juga berupaya mendorong keterlibatan pemerintah desa melalui pemanfaatan dana desa untuk mendukung penyediaan sarana dan kegiatan persampahan sebagai bentuk perluasan sumber daya di luar anggaran organisasi. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bentuk adaptasi yang dilakukan masih bersifat responsif terhadap masalah yang muncul dan belum sepenuhnya bersifat antisipatif terhadap kebutuhan jangka panjang. Keterbatasan armada, belum tersedianya TPA milik daerah, serta ketergantungan terhadap mekanisme anggaran perubahan menunjukkan bahwa organisasi masih berfokus pada upaya mempertahankan pelayanan dasar dibandingkan menciptakan solusi permanen terhadap akar permasalahan yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan indikator adaptation yang dikemukakan oleh Steers (1977), kemampuan adaptasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dapat dikategorikan cukup efektif namun belum optimal, karena meskipun organisasi mampu mempertahankan pelayanan di tengah berbagai keterbatasan, kapasitas adaptasi jangka panjang masih perlu diperkuat melalui peningkatan pembiayaan, sarana prasarana, dan kapasitas kelembagaan (Ferronato & Torretta, 2019; Guerrero et al., 2013; Wilson et al., 2015; Kaza et al., 2018).

Sintesis Ketiga Indikator Efektivitas Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengelolaan anggaran persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dapat dipahami melalui keterkaitan antara indikator goal attainment (pencapaian tujuan), integration (integrasi), dan adaptation (adaptasi) sebagaimana dikemukakan oleh Steers (1977). Ketiga indikator tersebut saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang menentukan keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat. Pada aspek goal attainment, organisasi telah memiliki sistem perencanaan yang jelas dan program yang terarah, tetapi pencapaiannya masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran, armada, dan fasilitas pendukung. Pada aspek integration, koordinasi internal antarunit kerja telah berjalan dengan baik, meskipun integrasi eksternal dengan pemerintah desa dan pengelola fasilitas pembuangan akhir masih memerlukan penguatan. Sementara itu, pada aspek adaptation, organisasi telah menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai keterbatasan melalui mekanisme perubahan anggaran, pengembangan program pengurangan sampah, serta penyesuaian operasional pelayanan di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan persampahan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi antara pencapaian tujuan, kualitas koordinasi, dan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang memengaruhi ketiga indikator efektivitas tersebut secara bersamaan. Keterbatasan anggaran menyebabkan sebagian target pelayanan belum dapat dicapai secara optimal, memunculkan kebutuhan koordinasi yang lebih intensif dalam mengelola

sumber daya yang terbatas, serta mendorong organisasi untuk terus melakukan berbagai bentuk penyesuaian agar pelayanan tetap berjalan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena masing-masing saling memengaruhi dalam menentukan efektivitas organisasi. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Steers (1977) yang menegaskan bahwa efektivitas organisasi merupakan hasil dari kemampuan organisasi mencapai tujuan, membangun integrasi, dan beradaptasi terhadap lingkungan secara seimbang. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan anggaran persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dapat dinilai cukup efektif, tetapi masih memerlukan peningkatan kapasitas fiskal, penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta strategi adaptasi yang lebih berorientasi jangka panjang agar tujuan pelayanan persampahan dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Penilaian Efektivitas Pengelolaan Anggaran Persampahan Secara Keseluruhan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori Efektivitas Organisasi dari Steers (1977), pengelolaan anggaran persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang menunjukkan bahwa ketiga indikator efektivitas, yaitu goal attainment, integration, dan adaptation, telah berjalan dalam pelaksanaan pelayanan persampahan. Dari aspek pencapaian tujuan, organisasi telah memiliki sistem perencanaan yang terstruktur melalui RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja serta berbagai program yang diarahkan untuk mendukung pelayanan persampahan. Dari aspek integrasi, koordinasi internal antara bagian perencanaan, PPTK, dan keuangan telah berjalan cukup baik sehingga proses pengelolaan anggaran dapat dilakukan sesuai prosedur. Sementara itu, dari aspek adaptasi, organisasi mampu mempertahankan pelayanan melalui berbagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan anggaran, sarana, dan kapasitas operasional yang dimiliki. Temuan ini menunjukkan bahwa organisasi masih mampu menjalankan fungsi pelayanan persampahan meskipun menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Bryson et al. (2014) dan Ferronato dan Torretta (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola sumber daya, membangun koordinasi, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Namun demikian, efektivitas pengelolaan anggaran persampahan belum mencapai kondisi yang optimal karena masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi kualitas pelayanan. Kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran, keterbatasan armada pengangkut, belum tersedianya TPA milik daerah, serta belum optimalnya dukungan pemerintah desa dalam pembiayaan persampahan menjadi faktor yang membatasi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara maksimal. Selain itu, sebagian besar bentuk adaptasi yang dilakukan masih bersifat responsif terhadap permasalahan yang muncul dan belum sepenuhnya berorientasi pada penyelesaian jangka panjang. Oleh karena itu, secara keseluruhan efektivitas pengelolaan anggaran persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dapat dikategorikan cukup efektif namun belum optimal. Peningkatan efektivitas ke depan memerlukan penguatan kapasitas fiskal daerah, penambahan sarana dan prasarana persampahan, pembangunan fasilitas pembuangan akhir yang lebih mandiri, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat agar pengelolaan persampahan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Guerrero et al., 2013; Kaza et al., 2018; Ferronato & Torretta, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengelolaan anggaran persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dapat dikategorikan cukup efektif namun

belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara kebutuhan anggaran persampahan yang relatif besar dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga berbagai program yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan secara maksimal dan organisasi lebih memprioritaskan kegiatan operasional dasar seperti pengangkutan sampah, pemeliharaan armada, pembayaran petugas, dan biaya operasional lainnya. Meskipun demikian, organisasi telah memiliki sistem perencanaan yang jelas, koordinasi internal yang cukup baik, serta kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai keterbatasan melalui mekanisme perubahan anggaran, revisi anggaran, dan pengembangan program persampahan. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, jumlah armada yang belum memadai, ketergantungan terhadap TPA Cilowong, serta belum optimalnya dukungan berbagai pemangku kepentingan masih menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pelayanan persampahan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran persampahan memerlukan penguatan kapasitas pendanaan, sarana dan prasarana, serta kerja sama yang lebih luas agar pelayanan persampahan dapat berjalan secara lebih optimal, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Qdais, H. A., Shatnawi, N., & Al-Shahrabi, R. (2023). Modeling the impact of fees and circular economy options on the financial sustainability of the solid waste management system in Jordan. *Resources*, 12(3), 32. <https://doi.org/10.3390/resources12030032>
- Agyaputeri, B. K., Nurhasana, R., & Rohimah, A. (2025). Integrasi aspek perencanaan, penganggaran, dan teknis persampahan dalam pengelolaan sampah terpadu di DKI Jakarta. *Jurnal Riset Jakarta*, 18(1).
- Amilia, R. (2024). Analisis evaluasi kebijakan publik dalam pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*.
- Batista, M., Caiado, R. G. G., Quelhas, O. L. G., Lima, G. B. A., Leal Filho, W., & Rocha Yparraguirre, I. T. (2021). A framework for sustainable and integrated municipal solid waste management: Barriers and critical factors to developing countries. *Journal of Cleaner Production*, 312, 127516. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127516>
- Bharadwaj, B., Rai, R. K., & Nepal, M. (2020). Sustainable financing for municipal solid waste management in Nepal. *PLOS ONE*, 15(8), e0231933. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231933>
- Breukelman, H., Krikke, H. R., & Löhr, A. J. (2022). Root causes of underperforming urban waste services in developing countries: Designing a diagnostic tool, based on literature review and qualitative system dynamics. *Waste Management & Research*, 40(9), 1337–1355. <https://doi.org/10.1177/0734242X221074189>
- Doussoulin, J. P., & Colther, C. (2022). Evaluating the efficiency of municipal solid waste collection services in developing countries: The case of Chile. *Sustainability*, 14(23), 15887. <https://doi.org/10.3390/su142315887>
- Ezeudu, O. B., & Bristow, D. (2025). Financing methods for solid waste management: A review of typology, classifications, and circular economy implications. *Sustainable Development*, 33(2), 3062–3085. <https://doi.org/10.1002/sd.3256>
- Ezeudu, O. B., & Ugochukwu, U. C. (2024). Financing mechanism for solid waste management in Anambra, Nigeria: Analyses of emerging challenges and implication for circular economy. *Environmental Science and Pollution Research*, 31, 27634–27652. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-33178-0>

- Fernando, S. J., & Zutshi, A. (2023). Municipal solid waste management in developing economies: A way forward. *Cleaner Waste Systems*, 5, 100103. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2023.100103>
- Hasan, W., Naswar, N., Oktaviani, P. R. S., & Idris, I. (2025). Strengthening institutional synergy in waste management: Challenges and strategic solutions. *Jurnal Legislatif*.
- Khoirunnisa, S., Ikomatussuniah, I., & Rayhan, A. (2025). Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pengurangan penggunaan kantong plastik. J-CEKI. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
- Latanna, M. D., Gunawan, B., Franco-García, M. L., & Bressers, H. (2023). Governance assessment of community-based waste reduction program in Makassar. *Sustainability*, 15(19), 14371. <https://doi.org/10.3390/su151914371>
- Lestari, A., & Ningsih, S. (2025). The effectiveness of environmental function spending in improving waste management efficiency in Indonesia. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 6(3), 674–682. <https://doi.org/10.31258/current.6.3.674-682>
- Maulana, M. A., Syukri, A., & Nurfaisal, M. D. (2024). Optimalisasi teknologi untuk efisiensi pengelolaan sampah di Kota Serang. *Kybernology Journal*.
- Miftahadi, M. F., Rachman, I., & Matsumoto, T. (2024). Optimizing Indonesian municipal solid waste collection scenarios: Integration of multi-objective search simulation and social cost-benefit analysis. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 26, 1569–1587. <https://doi.org/10.1007/s10163-024-01910-0>
- Ni'mattullah, A., Sjafari, A., & Riswanda, R. (2022). Manajemen pengelolaan sampah di Kota Serang. *Jurnal Manajemen Agribisnis*.
- PPID Kota Serang. (2024). Realisasi retribusi sampah Kota Serang.
- Ratnasari, S., Mizuno, K., Herdiansyah, H., & Simanjuntak, E. G. H. (2023). Enhancing sustainability development for waste management through national–local policy dynamics. *Sustainability*, 15(8), 6560. <https://doi.org/10.3390/su15086560>
- Rizky, S. A., Saputra, A. P., & Asropi, A. (2024). Model collaborative governance dalam pengelolaan persampahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*.
- United Nations Environment Programme, & International Solid Waste Association. (2024). *Global waste management outlook 2024: Beyond an age of waste—Turning rubbish into a resource*. United Nations Environment Programme.
- Wikurendra, E. A., Csonka, A., Nagy, I., & Nurika, G. (2024). Urbanization and benefit of integration circular economy into waste management in Indonesia: A review. *Circular Economy and Sustainability*, 4(2), 1219–1248. <https://doi.org/10.1007/s43615-024-00346-w>
- World Bank. (2021). *Bridging the gap in solid waste management: Governance requirements for results*. World Bank.
- World Bank. (2023). *Concept project information document: Indonesia Local Service Delivery Improvement Project (P180270)*. World Bank.
- Zahrah, Y., Yu, J., & Liu, X. (2024). How Indonesia's cities are grappling with plastic waste: An integrated approach towards sustainable plastic waste management. *Sustainability*, 16(10), 3921. <https://doi.org/10.3390/su16103921>